



Imam Berjuang, Haryadi Bersyukur

Imbas Hasil
Rekapitulasi Akhir
Pilwali Jogja 2017



JOGJA - Kondisi saling bertolak belakang dialami dua pasangan calon (paslon) Wali Kota-Wakil Wali Kota Jogja 2017. Jika paslon Imam Priyono - Achmad Fadli (IP-Fadli) masih terus berikhtiar, tidak demikian dengan Haryadi Suyuti - Heroe Poerwadi (HS-HP) yang memilih tawakal dan bersyukur. Perbedaan tersebut ditunjukkan dalam menyikapi hasil akhir rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Jogja 2017 di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Dimana kemenangan jatuh pada paslon nomor urut dua, HS-HP, dengan

selisih 1187 suara atas IP-Fadli. Kendati demikian, dua paslon tersebut sama-sama bertekad menghormati proses demokrasi yang sedang terjadi.

Kemarin (26/2), IP-Fadli bersama pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Jogja dan tim pemenangan mendatangi posko Pengaduan Kecurangan dan Advokasi Pilkada Serentak 2017 di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta. Kehadiran paslon nomor urut 1 untuk menyusun materi gugatan atas hasil rekapitulasi suara yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) »

► Baca Imam... Hal 7

■ IMAM...

Sambungan dari hal 1

Dihubungi lewat telepon selulernya, IP mengaku tetap percaya diri bakal mampu membalik keadaan di MK. Bermodal informasi dari saksi, tim pemenangan, dan relawan, serta bukti adanya dugaan kecurangan pilwali.

"Ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa kami sebenarnya bisa memenangkan pilwali," klaim IP. Gugatan ke MK, kata IP, sekaligus menjadi sarana mendidik masyarakat dalam berdemokrasi.

Jumlah surat suara tidak sah yang mencapai 14.356 tetap menjadi salah satu bahan pengaduan. IP menilai, jumlah tersebut tidak wajar. Apalagi jika dibandingkan dengan Pemilihan Presiden 2014, yang hanya ada 3.400 surat suara tidak sah. Atau naik lebih dari 400 persen. IP juga meminta akademisi untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut.

"Apakah pengertian masyarakat mundur dalam pencoblosan atau memang masyarakat tidak memperhatikan pilwali atau memang ada indikasi lain," selidik bekas wakil wali kota Jogja itu.

Lebih dari itu, IP mempertanyakan KPU Kota Jogja yang

menolak membuka kembali semua kotak surat suara tidak sah. Menurutnya, langkah itu sebagai bentuk transparansi. "Banyak warga Jogja yang bertanya ke saya," lanjut IP.

Terpisah, Haryadi Suyuti mengaku bersyukur atas hasil pilwali. Meski rekapitulasi suara belum ditetapkan secara resmi oleh KPU Kota Jogja. "Adanya dinamika itu kami pahami. Yang jelas semua proses mulai TPS, PPK, hingga di KPU berjalan dengan baik. Semua patut kita syukuri," ujar HS.

Sementara itu, selain mengajukan gugatan ke MK, tim pemenangan IP-Fadli juga berencana melaporkan komisioner KPU Kota Jogja ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Fokki Ardiyanto, saksi utama tim paslon IP-Fadli, menilai para komisioner KPU tidak konsisten membuka surat suara tidak sah. Fokki meradang karena ada surat suara yang dinilainya sah tapi dimasukkan ke surat suara tidak sah. Seperti di Kecamatan Umbulharjo.

Karena itulah pihaknya mengusulkan dibukanya kembali surat suara tidak sah. Fokki menuding, dalam rapat pleno rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan Umbulharjo mengakui ada ketidakpahaman kelompok

penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS). Tapi penjelasan tersebut tidak ditanggapi KPU. "Karena itu kami mengindikasikan ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan KPU," ujarnya.

Tim paslon HS-HP juga akan mengajukan laporan serupa atas pelaksanaan pilwali. Hanya, lembaga yang dilaporkan adalah panitia pengawas pemilu (panwaslu).

Nurchayyo Nugroho, saksi utama paslon HS-HP, mendasarkan laporannya pada langkah panwaslu yang tiba-tiba meminta KPU mengesahkan dua surat suara tidak sah di TPS 4 Kotabaru, Gondokusuman untuk paslon IP-Fadli. Padahal, sebelumnya kedua surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Saat itu Ketua Panwaslu Kota Jogja Agus Muhammad Yasin beralasan tidak dimintai rekomendasi oleh KPU. "Kami kecewa dengan langkah panwas yang seenaknya membolak-balik keputusan. Pasti akan kami laporkan ke DKPP," ujarnya.

Sebelumnya, pengurus DPD PDI Perjuangan DIJ juga berencana melaporkan panwaslu ke DKPP. Itu terkait dugaan kasus ketidaknetralan aparat sipil negara (ASN) Pemkot Jogja. Namun, saat itu panwaslu menyatakan laporan tersebut tidak

dapat dilanjutkan untuk diproses sebagai pidana pemilu karena kekurangan bukti formil. "Kami menilai panwas tidak bersikap tegas dalam memproses masalah ini," kata Eko Suwanto, salah seorang pengurus DPD PDI Perjuangan DIJ Eko Suwanto.

Mengenai tuduhan dan rencana aksi pelaporan terkait pemilu, dua lembaga penyelenggara pilwali membuka ruang seluas-luasnya kepada kedua tim paslon. Baik KPU maupun panwaslu siap beradu bukti jika semua laporan kelak diproses hukum.

Kekecewaan atas pelaksanaan Pilwali Jogja 2017 juga ditunjukkan Ketua DPD PDI Perjuangan DIJ Bambang Praswanto. Selain menuding panwaslu dan komisioner KPU terlalu acuh atas usulan dan laporan keberatan tim paslon nomor urut 1, Bambang melihat banyak kegagalan dalam proses perhitungan surat suara dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

"Kami berjuang ke Mahkamah Konstitusi tidak untuk minta menang. Tapi keadilan atas indikasi kecurangan ini," ujar Bambang di sela perayaan HUT-ke 44 PDI Perjuangan di halaman parker Stadion Tridadi, Sleman kemarin.

Dalam kesempatan itu Bambang

juga menyoroti banyaknya surat suara tidak sah. Menurutnya, 14 ribu surat suara tidak sah dari total sekitar 199 ribu pemilih

tidak logis. "Ini luar biasa dan tidak betul karena warga Jogja sudah cerdas," katanya. Mengenai DPT, Bambang menuding

masih banyak daftar pemilih yang telah meninggal dunia atau pindah alamat tetap dicantumkan. (pra/dwi/yog/nn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005